

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kenaikan MtM (Maret Ke April) sebesar 1,49 % mengindikasikan tekanan harga cukup kuat kemungkinan besar untuk komoditas pangan dan barang kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Ini mencerminkan **kenaikan permintaan musiman**.

**Mei:** Penurunan inflasi YoY ke angka 0,16 % menunjukkan **stabilisasi harga kebutuhan pokok**, berpotensi berkat pasokan yang cukup dan penurunan lonjakan pasca-momen Ramadan di Kabupaten Dharmasraya.

**Juni:** Monitoring BPS menyebut adanya **penurunan harga komoditas** secara umum; ini berarti masyarakat merasakan **keringanan harga**, terutama untuk bahan pokok dan kebutuhan harian.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Daya beli masyarakat diakhir bulan April cenderung turun dikarenakan konsumsi masyarakat/ data masyarakat telah dihabiskan untuk Lebaran/idulfitri. namun hal tersebut diuntungkan dengan harga beras yang relatif mengalami penurunan seiring dengan masih tersedianya stok beras baik di bulog maupun hasil produksi padi masyarakat.

2. Efisiensi anggaran pemerintah berdampak koordinasi dan pantauan lapangan menjadi menjadi kurang. data hanya dikumpulkan/direkap dari tim lapangan secara soft copy. analisa lapangan hanya berdasarkan data bukan pengamatan langsung di lapangan.

3. sebagai daerah konsumen (selain beras) pemerintah Kabupaten Dharmasraya sangat bergantung dengan daerah produsen, kemandirian pangan belum dapat tercipta secara maksimal, selain dengan kabupaten/kota produsen Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga tergantung dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat. Karenan Pemerintah provinsi memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan kabupaten/kota di Sumbar terkait dengan pemenuhan atau distribusi kebutuhan bahan pangan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sampai dengan saat ini kebijakan pelaksanaan pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah salah satunya adalah dengan pemantauan harga pasar harian.

pemantauan harga dilakukan oleh tim dinas pangan dan kumperdag dengan langsung meninjau langsung ke pasar oleh tim survei. hal ini dilakukan untuk memastikan harga real di lapangan dan ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat.

Harga yang mengalami gejolak akan langsung didiskusikan oleh TPID Kabupaten Dharmasraya, untuk ditindaklanjuti dengan mengambil kebijakan yang sesuai untuk mengatasi atau menurunkan harga. misalkan dengan berkoordinasi dengan distributor agar dapat menyediakan lebih banyak komoditas yang bermasalah, atau dengan operasi dan sidak pasar untuk mengedalikan harga dan mencegah adanya penimbunan terhadap komoditas tertentu.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan pemantauan harga, menjadi sangat efektif dan efisien di terapkan di kabupaten Dharmasraya dengan keterbatasan anggaran yang ada.

Anggaran untuk operasi pasar juga telah disediakan di dinas-dinas terkait (Dinas Pangan dan Perikanan) jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera direalisasikan.

pemanfaatan dana CSR juga dapat di realisasikan, hubungan yang baik dnegna dunia usaha, dapat mempermudah/memperlancar/dan mempercepat realisasi CSR dari dunis usaha jika di butuhkan pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi. dunia usaha juga sangat terbantu dengan kondisi inflasi yang terkendali.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk selanjutnya kebijakan pengendalian inflasi kedepan.

1. Pemantauan harga dinilai masih cukup efektif di Kabupaten Dharmasraya akan tetap di pertahankan.
2. penguatan pangan daerah, dilakukan dengan memperkuat sektor pertanian dengan memperkuat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Menjaga luas areal pertanian sesuai.
3. Menjalin / menjajaki kerjasama antar daerah tetangga di wilayah provinsi Sumatera Barat atau daerah tetangga lainnya yang memiliki keunggulan komparatif di bidang pangan.